

III.A.1.b.3).(2)

ISSN 2087- 8478

CIVIS

Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan
Volume I / Nomor I Januari 2011



FPIPS IKIP PGRI Semarang

CIVIS

Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan

Terbit dua kali setahun , yaitu pada bulan Januari dan Juli yang menampilkan tulisan ilmiah dari hasil penelitian, kajian pustaka , kajian dan aplikasi teori , serta hasil analisis tentang ilmu sosial dan pendidikan

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang belum pernah dimuat dalam media cetak lain. Naskah diketik rapi dengan spasi rangkap pada kertas kuarto, panjang tulisan antara 8-15 halaman. Redaksi berhak untuk melakukan perubahan sepanjang tidak mengurangi atau mengubah maksud tulisan. Tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan untuk diadakan penyempurnaan.

Penanggung Jawab	Muhdi Titik Haryati
Penyunting	Sudharto Abu Su'ud
Pimpinan Redaksi	Rosalina Ginting
Sekretaris Redaksi	Agus Sutono
Dewan Redaksi	Sri Suneki Suwarno Widodo Sapto Budoyo Wahyu Widodo Kiki Aryaningrum
Staff Redaksi	Sri Windarti Bambang Setyobudi Aulia Nur

Jurnal Ilmiah *CIVIS* diterbitkan oleh : FPIPS IKIP PGRI Semarang
Alamat Redaksi dan tata Usaha : FPIPS IKIP PGRI Semarang Gedung Pusat Lantai 3
Jl. Sidodadi Timur No 24 Semarang Telp. 0248316377 Fax. 024 8448217
Email : jurnal_civis@yahoo.com

Pengantar Redaksi

Volume I Nomor 1 Januari 2011

Pembaca yang budiman,

Jurnal Ilmiah *CIVIS* untuk pertama kalinya hadir dihadapan pembaca. Jurnal Ilmiah *CIVIS* membawa amanat untuk mengangkat kajian-kajian sosial dan kependidikan baik yang bersumber dari hasil-hasil penelitian, maupun tulisan ilmiah lainnya. Sesuai dengan idealisme yang dibawa, Jurnal ini memegang idealisme untuk selalu dapat memberi warna dalam dinamika intelektual di bidang sosial dan kependidikan, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etik pengembangan ilmu di Indonesia.

Untuk Volume 1 No 1 Januari 2011 ini Jurnal *CIVIS* menurunkan 9 tulisan. Tulisan berjudul *Aliran Realisme dalam Filsafat Pendidikan* ditulis oleh Agus Sutono; *Penerapan Model Pembelajaran Role Playing pada Pembelajaran PKn Kelas XI semester Gasal di SMA Futuhiyyah Mranggen*, merupakan tulisan hasil penelitian Kiki Aryaningrum; *Implementasi Bela Negara untuk Mewujudkan Nasionalisme* dikupas secara mendalam oleh Suwarno Widodo. Pada bagian lain Wahyu Widodo menurunkan tulisan berjudul *Nikah Sirri Menurut UU No 1 Tahun 1974*, sedangkan Roch Eddy Prabowo menyajikan tulisan menarik berjudul *Demokrasi Pancasila sebagai Model Demokrasi yang Rasional dan Spesifik*. Jurnal kali ini juga dilengkapi dengan tulisan karya Rosalina Ginting dan Agus Sutono yang mencoba mengupas perspektif sosio-kultural masyarakat Jawa yang berjudul *Sistem Sewa Tanah Dalam Upaya Penghapusan Feodalisme di Jawa Abad XIX, Fragmen Sosio-kultural pada Masyarakat Jawa*. Spto Budoyo menampilkan tulisan berjudul *Ber Acara dalam Perkara Perdata*. Dua tulisan penutup ditulis oleh Sri Suneki dan Haryono masing-masing dengan judul *Membangun Masyarakat Berbasis Pluralisme Kultural* dan *Membangun Sistem Hukum Pidana yang Berkeadilan*

Pembaca yang budiman,

Tegur sapa, dan sumbang saran yang konstruktif demi perbaikan jurnal ini kedepan tentu sangat diharapkan. Untuk itu melalui Jurnal Ilmiah *CIVIS* ini diharapkan dapat menjadi sarana yang baik dan tepat untuk semakin menghidupkan budaya akademik yang kreatif, semangat mengembangkan diri dan lingkungan melalui ide-ide segar di lingkungan akademis pendidikan tinggi.

Akhirnya kami mengucapkan selamat membaca dan semoga jurnal ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama.

Redaksi

DAFTAR ISI

Volume I Nomor 1 Januari 2011

1. Aliran Realisme dalam Filsafat Pendidikan, 1
Agus Sutono
2. Penerapan Model Pembelajaran Role Playing Pada Pembelajaran PKn Kelas XI semester Gasal di SMA Futuhiyyah Mranggen, 12
Kiki Aryaningrum
3. Implementasi Bela Negara untuk Mewujudkan Nasionalisme, 32
Suwarno Widodo
4. Nikah Sirri Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974
Wahyu Widodo
5. Demokrasi Pancasila Sebagai Model Demokrasi Rasional dan Spesifik, 76
Roch. Eddy Prabowo
6. Sistem Sewa Tanah Dalam Upaya Penghapusan Feodalisme di Jawa Abad XIX, Fragmen Sosio-kultural pada Masyarakat Jawa, 94
Rosalina Ginting & Agus Sutono
7. Ber Acara dalam Perkara Perdata, 105
Sapto Budoyo
8. Membangun Masyarakat Indonesia Berbasis Pluralisme Kultural, 117
Sri Suneki
9. Membangun Sistem Hukum Pidana Yang Berkeadilan Sosial, 125
Haryono

Demokrasi Pancasila Sebagai

Model Demokrasi Yang Rasional Dan Spesifik

Roch. Eddy Prabowo

Abstrak

Demokrasi Pancasila lebih memiliki landasan berpikir yang rasional dan spesifik dibandingkan dengan Demokrasi Liberal maupun Demokrasi Rakyat (Komunis). Demokrasi Liberal meletakkan kebebasan individu sebagai dasar pelaksanaan demokrasi. Falsafah yang digunakan adalah manusia sebagai individu yang bebas. Demokrasi Rakyat meletakkan dasar kemasyarakatan sebagai pola pelaksanaan demokrasi. Falsafah yang digunakan adalah manusia hidup dalam pola struktur persekutuan (*commune structure*). Demokrasi Pancasila meletakkan hikmat kebijaksanaan (akal sehat) sebagai dasar pelaksanaan demokrasi. Falsafah yang digunakan adalah manusia sebagai mahluk berpikir.

Mengingat dalam demokrasi membuka ruang gerak untuk berbeda pendapat, maka perbedaan itu harus dipandang sebagai modal dasar bagi perkembangan hidup manusia. Oleh karena itu, dalam mengelola perbedaan membutuhkan akal sehat, bukan individu yang bebas maupun individu yang terbelenggu oleh kemasyarakatan. Dengan akal sehat, maka perbedaan akan menjadi berkah bagi kehidupan manusia dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan hidup dan kehidupan manusia beserta alam lingkungannya.

Kata Kunci: Demokrasi Pancasila, Demokrasi Liberal, Demokrasi Komunis, akal sehat, rasional, individualis, sosialis.

C. Pendahuluan

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) selama ini belum membiasakan pengalaman nilai-nilai kehidupan demokrasi sosial kemasyarakatan yang riil, dengan melibatkan mahasiswa dan seluruh civitas akademika dalam berbagai aktivitas, baik di kelas (kampus) maupun di luar kampus (Zuriah dalam Bestari, 2010: 140). Hal ini dapat saja terjadi, a.l. disebabkan oleh sikap dan perilaku yang lebih dominan otokrasi dari para individu maupun sikap dan perilaku yang masih dalam proses pencarian model demokrasi di lingkungan kita.

Alasan pertama, dapat diamati antara lain dari sikap dan perilaku Susilo Bambang Yudhoyono (SBY; Presiden RI ke-6) yang lebih memaksakan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan cara pemilihan dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta daripada pengisian dengan cara penetapan yang diinginkan oleh DPRD DIY dan masyarakat Yogyakarta melalui Rapat Paripurna DPRD pada hari Senin, 13 Desember 2010. Alasan kedua nampak dari para politikus maupun beberapa tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bahkan ilmuwan yang belum paham tentang Demokrasi Pancasila. Sebagai contoh adalah tayangan salah satu TV Swasta Nasional yang menyiarkan secara langsung wawancara tokoh LSM yang memprakarsai kerbau bertopeng SBY dan beberapa politikus dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka menyatakan, bahwa masyarakat masih dalam proses mencari bentuk demokrasi yang ideal bagi masyarakat

bangsa dan negara Indonesia. Adapun dari kalangan ilmuwan masih ada yang menyatakan, bahwa :

“ perlu disadari dan dicermati, bahwa prinsip dan konsep demokrasi itu telah dirintis dan dipraktikan di kota Athena dalam bentuk demokrasi langsung, kemudian berkembang menjadi demokrasi modern dengan sistem perwakilan.... Penerapan dan praksisnya di masing-masing negara menunjukkan adanya komonolitas dan keunikan masing-masing. Di Indonesia, dalam satu kontinum yang merentang antara titik demokrasi liberal ala Amerika yang sangat mementingkan individu dengan demokrasi fasistis ala komunis yang menempatkan kepentingan negara yang paling utama.” (Winata dikutip oleh Nurhami dalam Bestari, 2010: 133).

Seharusnya pendapat di atas tidak perlu terjadi, sebab PPKI sudah merumuskan konsep dan prinsip dasar Demokrasi Pancasila sejak 1945. Hanya karena mereka silau dengan kepopuleran Demokrasi Liberal maupun Demokrasi Rakyat, maka lupa mempelajari Demokrasi Pancasila. Padahal konsep dan prinsip dasar Demokrasi Pancasila jauh lebih rasional dan spesifik dibandingkan dengan kedua demokrasi tersebut.

Melalui lembar kerja ini, penulis ingin menyakinkan kepada pembaca bahwa Demokrasi Pancasila bukan satu titik di antara rentangan demokrasi liberal ala Amerika yang sangat mementingkan individu dengan demokrasi fasistis ala komunis yang menempatkan kepentingan negara yang paling utama.

Dimanakah letak kerasionalan dan kespesifikasikan Demokrasi Pancasila dibandingkan dengan Demokrasi Liberal maupun Demokrasi Rakyat?

Mengapa justru di Indonesia Demokrasi Pancasila terpendam oleh praktik-praktik Demokrasi Liberal maupun Demokrasi Rakyat?

B. Pembahasan

2. Letak kerasionalan dan kespesifikasikan Demokrasi Pancasila dibandingkan dengan Demokrasi Liberal maupun Demokrasi Rakyat

Untuk menemukan letak kerasionalan dan kespesifikasikan-an Demokrasi Pancasila dibandingkan dengan Demokrasi Liberal maupun Demokrasi Rakyat, maka langkah yang pertama kali dilakukan adalah dengan membandingkan dasar dan falsafah dari ketiga demokrasi tersebut. Adapun langkah kedua adalah dengan membahas secara mendalam tentang Demokrasi Pancasila.

Tabel 1. Perbandingan Demokrasi Liberal, Demokrasi Rakyat, dan Demokrasi Pancasila

Faktor Pembeding	Demokrasi Liberal	Demokrasi Rakyat	Demokrasi Pancasila
Dasar pelaksanaan	Kebebasan individu	Kemasyarakatan	Hikmat kebijaksanaan (akal sehat)
Falsafah yang digunakan	Manusia sbg individu yang bebas	Manusia sbg komponen terkecil masyarakat	Manusia sbg mahluk berpikir

3) Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal meletakkan kebebasan individu sebagai dasar pelaksanaan demokrasi. Falsafah yang digunakan adalah manusia sebagai individu yang bebas. (Kaelan dkk, 2007: 61).

Dalam Demokrasi Liberal dikenal adanya perwakilan liberal, kehidupan demokrasi yang demikian memunculkan istilah demokrat-demokrat liberal. Partisipasi individu untuk kehidupan kenegaraan disalurkan melalui wakil-wakil yang dipilih melalui proses demokratis.

Menurut Held (Kaelan 2007: 61) demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu pembaruan kelembagaan pokok untuk mengatasi problema keseimbangan antara kekuasaan memaksa dengan kebebasan. Namun demikian perlu disadari, bahwa dalam prinsip demokrasi ini apapun yang dikembangkan melalui kelembagaan negara senantiasa merupakan suatu manifestasi perlindungan dan jaminan atas kebebasan individu dalam hidup bernegara. Rakyat harus diberikan jaminan kebebasan secara individual, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, keagamaan, bahkan kebebasan untuk anti terhadap agama.

Kebebasan individu yang mendapat perlindungan dan jaminan dari pemerintah tentu akan dapat menimbulkan dampak positif sekaligus dampak negatif. Dampak positif dalam bidang sosial budaya antara lain masing-masing individu tidak segan-segan untuk memaksimalkan karyanya, sebab pemerintah akan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap karya mereka. Orang tidak takut hasil karyanya dibajak oleh pihak lain, karena pemerintah member perlindungan dalam bentuk hak paten, hak cipta maupun

hak-hak atas kekayaan intelektual (HAKI) lainnya. Dari HAKI inilah mereka akan mendapatkan uang baik melalui royalty maupun bentuk lain.

Adapun dampak negatif Demokrasi Liberal dalam bidang sosial budaya antarlain pola hidup dengan modal berpakaian yang jauh dari nilai kepantasan di tempat-tempat umum menjadi hal yang biasa. Pola hidup *free sex* bukan merupakan perilaku yang harus dihindarkan, tetapi merupakan pola hidup umum. Oleh karena itu, pornografi dan pornoaksi merupakan bentuk kebebasan yang bisa diakses oleh siapa saja yang memerlukan.

Dampak positif dalam bidang ekonomi adalah prinsip efektifitas dan efisiensi akan selalu mengemuka, karena masing-masing kompetitor dituntut untuk selalu menguasai pasar. Penguasaan pasar hanya dapat diwujudkan dengan jalan menyediakan produk-produk bermutu namun berharga murah. Untuk merancang dan memproduksi produk bermutu yang berharga murah, maka perusahaan harus selalu meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Bagi mereka yang mampu memenangkan pasar, maka akan selalu bertambah kapital mereka. Hal yang demikian tentu sangat menguntungkan para kaum kapitalis.

Pada sisi lain, paham liberalis ini membawa dampak negatif dalam bidang ekonomi. Dampak negatif yang dimaksud adalah bagi mereka yang tidak mampu bersaing, akan mengalami kebangkrutan, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menjadi kaum buruh. Dalam demokrasi liberal diskriminasi antara majikan dan buruh merupakan hal yang sangat biasa.

Dampak positif Demokrasi Liberal dalam bidang politik antara lain pihak-pihak yang kalah dalam proses pemilihan umum secara sportif

mengakui kekalahan sekaligus menghormati pihak pemenang. Sebagai contoh pada saat pemilihan umum (Pemilu) Presiden Amerika Serikat (AS) ke-44 tanggal 4 Nopember 2008. Ketika dalam proses penghitungan suara menunjukkan, bahwa perolehan suara sementara Barack Obama dari Partai Demokrat lebih banyak daripada perolehan suara John McCain dari Partai Republik, maka John McCain langsung mengadakan jumpa konstituen untuk mengakui, menghormati, dan mendukung Barack Obama sebagai Presiden AS. Langkah John McCain tersebut dilakukan, karena secara rasional pihaknya sudah tidak dapat mengungguli perolehan suara Barack Obama.(i.wikipedia.org, 2010)

Walaupun AS merupakan negara yang paling konsisten dalam menerapkan Demokrasi Liberal, namun di sana hanya mempunyai dua partai politik (Parpol) yaitu: Partai Demokrat dan Partai Republik.

Adapun dampak negatif penerapan Demokrasi Liberal dalam bidang politik antara lain terdapat peluang bagi setiap warganegara mendirikan partai politik (Parpol). Sebagai contoh pada saat Indonesia menerapkan Demokrasi Liberal pada dekade tahun 1950-an. Pada saat Pemilu 1955 diikuti oleh lebih dari 25 Parpol. Kondisi seperti ini masuk dalam kategori dampak negatif, karena rawan terjadi kekisruhan, tidak efektif, dan tidak efisien.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penetapan kebebasan individu sebagai dasar pelaksanaan demokrasi dengan berfalsafah, bahwa manusia sebagai individu yang bebas dalam Demokrasi Liberal tidak rasional dan tidak spesifik.

2) Demokrasi Rakyat

Demokrasi Rakyat (Demokrasi Sosialis, Demokrasi Komunis) meletakkan dasar kemasyarakatan sebagai pola pelaksanaan demokrasi. Falsafah yang digunakan dalam Demokrasi Rakyat adalah kebebasan individu dibatasi oleh masyarakat.

Model ini mengacu pada sistem demokrasi yang dikemukakan oleh Karl Marx dengan pola struktur persekutuan (*commune structure*). Menurut demokrasi ini, masyarakat tersusun atas komunitas-komunitas kecil. Masing-masing komunitas yang paling kecil ini mengatur urusan mereka sendiri dalam rangka memilih wakil-wakilnya untuk unit-unit administrasi yang lebih besar; misalnya distrik atau kota. Kemudian masing-masing distrik memilih wakil-wakil untuk unit administrasi berikutnya dan pada titik akhir mendapatkan delegasi nasional.(Kaelan, 2007: 62).

Semua perwakilan dimasukkan kedalam lingkungan institusi tunggal yang bertanggung jawab secara langsung pada rakyat. Dalam demokrasi rakyat hanya mengenal satu partai yaitu: Partai Komunis yang merupakan instrumen dalam menciptakan landasan bagi sosialisme dan komunisme. Negara menerapkan Demokrasi Rakyat antara lain adalah Rusia, China, Korea Utara, dan Vietnam.

Sebagaimana Demokrasi Liberal, Demokrasi Rakyat juga mempunyai dampak positif sekaligus dampak negatif dalam bidang sosial-budaya, ekonomi, maupun politik.

Dampak positif Demokrasi Rakyat dalam bidang sosial-budaya antara lain semangat kebersamaan sangat tinggi. Adapun dampak negatif

antara lain kepentingan masing-masing individu selalu dikalahkan oleh kepentingan bersama. Padahal masing-masing individu memerlukan segala sesuatu untuk kebutuhan maupun kepuasan pribadi. Dalam kondisi yang lazim, kepentingan umum lebih utama dengan tetap memperhatikan kepentingan individu.

Dampak positif Demokrasi Rakyat dalam bidang ekonomi antara lain tidak mengenal adanya buruh dan majikan. Semua merupakan bekerja untuk kepentingan negara, karena negara merupakan manifestasi dari kepentingan para individu. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh Demokrasi Rakyat dalam bidang ekonomi antara lain tingkat kesejahteraan masing-masing individu ditentukan oleh pemerintah, sehingga sering terjadi tingkat kesejahteraan rakyat berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini sering tidak sebanding dengan pembelanjaan negara yang begitu besar untuk proyek-proyek negara, sebagai contoh proyek tenaga nuklir, proyek ruang angkasa, dan perlengkapan persenjataan.

Dalam bidang politik, dampak positif Demokrasi Rakyat antara lain kondisi keamanan dan ketertiban relatif sangat terkendali, karena hanya ada satu partai politik, yaitu Partai Komunis. Kemungkinan untuk saling menjatuhkan lawan politik dengan melibatkan massa pendukungnya sangat sedikit. Dengan demikian kebijakan-kebijakan pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan dukungan dari rakyat secara penuh.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan antara lain pemerintah cenderung berlaku sewenang-wenang, karena tidak ada kekuatan politik lain yang dapat dipilih oleh rakyat. Rakyat tidak mempunyai pilihan untuk

mencari alternatif pemimpin dari parpol lain. Oleh karena itu, suka atau susah, mendukung atau menolak tetap harus loyal kepada pemerintah.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penetapan kemasyarakatan (*commune*) sebagai dasar, falsafah dan penerapan Demokrasi Rakyat dalam bidang kehidupan manusia tidak rasional dan tidak spesifik.

1) **Demokrasi Pancasila**

Beranjak dari konsep inti Demokrasi Pancasila yang secara eksplisit berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Sila ke-4 Pancasila), maka Demokrasi Pancasila meletakkan hikmat kebijaksanaan sebagai dasar dalam pelaksanaan demokrasi.

Berikut ini uraian tentang Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sebagai inti Demokrasi Pancasila.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tidak menggunakan kata demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani, tetapi menggunakan kata kerakyatan yang benar-benar merupakan bahasa Indonesia. Kedua kata tersebut mempunyai arti yang sepadan, demokrasi mempunyai arti yang sama dengan kerakyatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan menelusuri makna kata kerakyatan sebagai berikut.

Kerakyatan merupakan kata sifat yang berarti sifat tentang rakyat. Segala sesuatu dikatakan tentang rakyat apabila benar-benar mencerminkan hakekat rakyat. Agar benar-benar mencerminkan rakyat, maka harus berasal

dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan ditujukan untuk rakyat. Kondisi ini oleh Abraham Lincoln disebut dengan demokrasi. Secara etimologi, demokrasi bukan bahasa Indonesia, namun bahasa Yunani. Padan kata istilah demokrasi dalam bahasa Indonesia adalah kerakyatan. Jadi kerakyatan adalah istilah demokrasi dalam bahasa Indonesia (Prabowo, 2009: 6) .

Hikmat kebijaksanaan tidak lain adalah akal sehat. Karena hikmat kebijaksanaan merupakan satu istilah, maka tidak dapat mencari pengertian hikmat kebijaksanaan dengan mengurai istilah tersebut menjadi hikmat dan kebijaksanaan. Kemudian mengartikan masing-masing kata tersebut dan menggabungkan kembali untuk mendapatkan pengertian atas istilah tersebut. Hal yang demikian tentu akan merubah makna istilah yang ditafsirkan. Ingat, bahwa untuk mendapatkan pengertian buah tangan tidak dapat mengurai istilah itu menjadi dua kata, yaitu: buah dan tangan. Untuk mendapatkan pengertian buah dada, tidak dapat mengurai istilah tersebut menjadi buah dan dada. Demikian pula untuk mencari arti dari istilah buah bibir dengan mengurai menjadi dua kata, yaitu buah dan bibir. Apabila hal yang demikian dilakukan untuk mengurai pengertian istilah-istilah yang terdiri dari satu kata, maka langkah itu salah.

Pernyataan hikmat kebijaksanaan tidak lain adalah akal sehat, berpijak pada pendapat Yamin (1971: 88) yang mengatakan,

“Hikmat kebijaksanaan adalah yang menjadi pimpinan kerakyatan Indonesia ialah rasionalisme yang sehat, karena telah melepaskan diri dari anarkhi, liberalism, dan semangat penjajahan”

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka Demokrasi Pancasila meletakkan akal sehat sebagai dasar pelaksanaan demokrasi. Falsafah yang digunakan adalah manusia mahluk berpikir.

Menetapkan akal sehat sebagai pemimpin dalam berdemokrasi merupakan pilihan yang sangat tepat, karena akal sehat inilah yang akan selalu membuat suasana selalu tenang dan damai dalam menghadapi segala bentuk perbedaan dalam berdemokrasi. Dengan akal sehat ini pula, para pelaku demokrasi dapat membuat keputusan-keputusan yang benar bagi semua pihak. Karena keputusan yang ditetapkan adalah benar bagi semua pihak, maka keputusan tersebut dapat diterima, dihormati, dan didukung oleh semua pihak. Dengan asumsi semua pihak harus berpikir dengan dasar akal sehat.

PPKI tidak menetapkan hati nurani sebagai landasan pelaksanaan Demokrasi Pancasila dan tidak menjadikan manusia berhati nurani sebagai falsafah dalam Demokrasi Pancasila. Hal ini akan menjadi sangat fatal, karena hati nurani akan mendatangkan sikap dan perilaku emosional bukan rasional. Akan sangat berbahaya pada saat orang berkumpul dengan membawa pendapat yang berbeda-beda. Emosi akan mudah terpantik dan dapat mengakibatkan pertikaian yang tidak seharusnya terjadi. Dalam kondisi seperti ini, makna demokrasi tidak berlaku lagi dan ada hanyalah sikap maupun perilaku anarkhis.

Euforia saling perang argumentasi, untuk istilah tidak ada etika dalam beradu pendapat, euforia adu jotos dalam persidangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), DPR, maupun DPRD melanda di era pasca

gerakan reformasi tahun 1999 di Indonesia. Hal ini sangat wajar terjadi, karena euforia yang terjadi selama ini adalah berpolitik dengan hati nurani bukan berpolitik dengan akal sehat sebagaimana diajarkan oleh Demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila mengajarkan menggunakan akal sehat sebagai pemimpin dalam permusyawaratan. Permusyawaratan merupakan pada kata dari perundingan (Depdiknas, 2005). Perundingan baru akan dilakukan, manakala terjadi perbedaan pendapat. Hal ini mengacu pada ajaran Al-Qur'an yang secara tegas mengajarkan, "apabila kamu berbeda pendapat, maka segeralah bermusyawarah." Bermusyawarah adalah proses perundingan, dengan kata lain musyawarah adalah berkumpulnya orang-orang yang berbeda pendapat untuk mendapatkan rumusan pendapat yang benar.

Musyawarah tidak mengajarkan pembuatan keputusan dengan cara pemilihan suara (voting), karena voting merupakan ajaran dari Demokrasi Liberal. Keputusan dengan cara voting belum tentu benar, karena yang dijadikan standar pengambilan keputusan adalah suara terbanyak. Bisa jadi keputusan yang ditetapkan adalah keputusan yang akan menyengsarakan orang banyak dan hanya mensejahterakan sekelompok orang saja. Hal ini tidak perlu dipikirkan yang penting adalah keputusan itu sudah sesuai dengan prosedur, yaitu suara terbanyak. Keputusan yang demikian dapat terjadi, bahkan sering terjadi, karena sekelompok orang yang akan diuntungkan mampu membayar kepada para pengambil keputusan.

Menurut sila ke-4, Demokrasi Pancasila mengajarkan demokrasi tidak langsung. Demokrasi Pancasila mengajarkan demokrasi perwakilan. Hal ini secara eksplisit terdapat pada akhir dari kalimat sila ke-4. Penjabaran dari ajaran ini antara lain terdapat pada Pasal 3 dan Pasal 6 UUD 1945 sebelum diamandemen. Di dalam pasal itu secara tegas mengemukakan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI. Presiden dan Wakil Presiden RI dipilih dan diangkat oleh MPR.

Konsekuensi demokrasi tidak langsung ini adalah para wakil harus benar-benar berbekal akal sehat untuk kepentingan peningkatan rasa keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, setiap anggota MPR harus berakal sehat dalam rangka memfokuskan diri untuk membuat keputusan-keputusan yang hanya demi peningkatan rasa keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Selama pemerintahan Orde Baru MPR tidak mampu menunjukkan kualitas sebagai orang yang berkakal sehat, sehingga keputusan-keputusan dalam memilih dan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden tidak memihak pada rakyat banyak. Akibat terburuk dari para anggota MPR yang tidak memiliki proporsi seorang yang berakal sehat adalah terjadi krisis moneter yang hingga kini masih dialami oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

Sikap dan perilaku para anggota MPR ini menimbulkan sikap dan perilaku tidak percaya rakyat Indonesia terhadap MPR maupun DPRD sebagai lembaga pemilih sekaligus penetap pimpinan eksekutif di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi. Inilah dasar yang digunakan para reformis untuk menggantikan demokrasi tidak langsung menjadi demokrasi langsung

dalam rangka mengisi jabatan Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Sebagaimana pembahasan dalam Demokrasi Liberal dan Demokrasi Rakyat, maka berikut ini dibahas tentang dampak positif maupun dampak negatif Demokrasi Pancasila dalam bidang kehidupan sosial-budaya, ekonomi dan politik.

Dampak positif Demokrasi Pancasila dalam kehidupan sosial budaya antara lain suasana hidup akan selalu tenang dan damai walaupun dalam suasana yang serba penuh beda dalam segala hal termasuk berbeda dalam pendapat, pandangan, agama, maupun politik. Adapun dampak negatif antara lain bisa terjadi seorang bapak rela membiarkan anaknya dihukum sepuluh tahun, karena sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dampak positif Demokrasi Pancasila dalam kehidupan ekonomi antara lain dalam melakukan kegiatan ekonomi harus selalu berdasarkan pada prinsip memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Adapun dampak negatif yang dapat terjadi antara lain seorang pejabat tidak akan mendapatkan hak pembuatan surat sakti untuk teman, saudara apalagi putranya sendiri dalam rangka memenangkan suatu tender proyek pembangunan.

Dampak positif Demokrasi Pancasila dalam kehidupan politik antara lain menutup kemungkinan adanya aksi kekecewaan para calon kepala eksekutif yang kalah dalam pemilu eksekutif. Pelampiasan kekecewaan yang berakibat pada perusakan fasilitas umum, menghambat aktifitas pemerintahan maupun rakyat tidak akan terjadi makala melaksanakan ajaran

Demokrasi Pancasila secara konsekuen. Adapun dampak negatif yang dapat ditimbulkan antara lain orang-orang harus menahan kekecewaan sebagai bentuk perwujudan emosi mereka. Bisa jadi orang akan menjadi stress berat, karena akal sehatnya belum digunakan.

Berdasarkan pada uraian tentang Demokrasi Pancasila di atas, maka dasar pelaksanaan sangat terfokus pada hikmat kebijaksanaan (akal sehat). Falsafah yang digunakannyapun sangat logis dan realistis, yaitu manusia mahluk berpikir.

Dengan demikian terjawab sudah, bahwa Demokrasi Pancasila lebih rasional dan spesifik daripada Demokrasi Liberal maupun Demokrasi Rakyat (Demokrasi Komunis).

1. Di Indonesia Demokrasi Pancasila terpendam oleh praktik-praktik Demokrasi Liberal maupun Demokrasi Rakyat

Euforia praktik Demokrasi Liberal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat menonjol dibandingkan dengan Demokrasi Pancasila. Hipotesis ini tentu mengundang pendapat yang kontra dibandingkan yang pro. Namun itulah pendapat yang dapat dibantah oleh pendapat yang lain.

Beberapa faktor yang melatarbelangi terjadi eforia seperti di atas a.l. masih sedikitnya orang yang benar-benar mempelajari, memahami, dan mempraktikan Demokrasi Pancasila. Hal ini didukung oleh buku-buku referensi yang mengupas Demokrasi Pancasila secara mendalam. Dalam buku-buku referensi masih cenderung mengemukakan komponen-komponen

yang tidak signifikan dalam mengemukakan karakteristik Demokrasi Pancasila. Komponen-komponen yang dikemukakan berlaku juga di dalam kehidupan Demokrasi Liberal maupun Demokrasi Rakyat.

Berikut ini bagian dari uraian tentang Demokrasi Pancasila yang terdapat di buku-buku referensi.

Di samping itu perlu juga kita pahami bahwa Demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan bertumpu pada:

- a) demokrasi yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b) menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;
- c) berkedaulatan rakyat;
- d) didukung oleh kecerdasan warga negara;
- e) sistem pemisahan kekuasaan negara;
- f) menjamin otonomi daerah;
- g) demokrasi yang menerapkan prinsip *rule of law*;
- h) sistem peradilan yang merdeka, bebas dan tidak memihak;
- i) mengusahakan kesejahteraan rakyat; dan
- j) berkeadilan sosial.

A. Penutup

Demokrasi Pancasila lebih rasional dan spesifik daripada Demokrasi Liberal maupun Demokrasi Rakyat (Demokrasi Komunis). Demokrasi Pancasila bukan seperti yang dikemukakan oleh Winata yang dikutip oleh Nurhami (Bestari, 2010: 133) yang menyatakan, bahwa Demokrasi Indonesia berada di satu titik kontinum antara titik demokrasi liberal ala

Amerika yang sangat mementingkan individu dengan demokrasi fasistis ala komunis yang menempatkan kepentingan negara yang paling utama.”

Akibat dari kurangnya referensi yang benar-benar mengupas tentang Demokrasi Pancasila dan begitu kuatnya eforia Demokrasi Liberal oleh para politikus dan elit kenegaraan, maka Demokrasi Pancasila tidak begitu tampak dalam praktik-praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agar Demokrasi Pancasila mendapat eforia di NKRI, maka masing-masing WNI harus mempelajari dan mempraktikkan Demokrasi Pancasila dalam setiap lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

Daftar Pustaka

Bestari, dkk, 2010

Depag RI, 1985, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Intermedia

Depdiknas, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

Kaelan dkk, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Edisi Pertama, Yogyakarta, Paradigma.

Komalasari, Kokom, dkk, 2010

Prabowo, Rokh Eddy, 2009, *Kompetensi dalam Pendidikan Kewarganegaraan: Berwawasan Global berjiwa Lokal*, Makalah Pendaping Seminar Internasional, Bandung, UPI.

Yamin, Muh., 1971, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar*, Jilid Pertama, Jakarta, tanpa penerbit.

[i.wikipedia.org/wiki/Pemilihan Umum-Presiden-Amerika-Serikat.2008](http://i.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum-Presiden-Amerika-Serikat.2008)